

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Peneliti menggunakan tinjauan pustaka sebagai referensi agar penelitian ini terarah. Tinjauan pustaka adalah bagian yang sangat penting dari sebuah laporan penelitian, karena pada bab ini juga diungkapkan pemikiran atau teori-teori yang melandasi dilakukannya penelitian.

##### **2.1.1 Efektivitas**

Efektivitas merupakan kata sifat yang berasal dari kata dasar efektif, yang mengandung arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.

Onong Uchjana Effendy dalam bukunya *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* menyatakan bahwa “teori efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan”. (Effendy, 2013:14). Definisi tersebut menunjukan bahwa efektivitas program dapat dilihat dari beberapa hal sebagai proses untuk menjalankannya. Upaya mengevaluasi jalannya suatu program kegiatan, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan

secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen suatu program kegiatan atau tidak. Berdasarkan hal tersebut, efektivitas merupakan pencapaian tujuan suatu program melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*).

Menurut Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas, sebagai “*That is, the greater the extent to which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness*”. (Gedeian dkk, 1991 : 61). Definisi tersebut menyimpulkan bahwa semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar pula efektivitas.

Selain itu, definisi efektivitas menurut Hidayat (1986 : 86) menyebutkan bahwa, “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Beberapa kutipan tersebut menyebutkan bahwa efektivitas dalam menjalankan suatu program atau kegiatan itu penting demi menjunjung pencapaian yang luar biasa. Hal tersebut untuk sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu program kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Efektivitas suatu program kegiatan bukan suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas dapat diukur

dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan, namun jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Menurut Duncan yang dikutip oleh Richard M. Steers dalam bukunya *Efektivitas Organisasi* mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oleh karena itu, digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja .  
(Steers, 2015:141)

Berdasarkan ukuran efektivitas diatas, proses dalam menjalankan program dapat menentukan pencapaian tujuan, tingkat kemampuan, dan penyesuaian diri untuk melalukan program maupun kegiatan agar dapat terealisasikan sebagaimana program kerja (proker) yang telah dibuat.

## **2.1.2 Corporate Social Responsibility**

### **2.1.2.1 Definisi Corporate Social Responsibility**

*Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. CSR memiliki definisi yang berbeda-beda sesuai dengan perspektif di dalam memandang CSR itu sendiri. Lawrence,

Weber, dan Post menjelaskan *Corporate Social Responsibility* dalam buku yang ditulis Dwi Kartika : “*CSR means that a corporation should be held accountable for any of its actions that affect people their communities, and their environment.*” (Kartika, 2013 : 2). Hal tersebut dapat diartikan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakannya yang memengaruhi orang-orang di sekitar mereka, dan lingkungan mereka.

Howard R. Bowen memiliki pendapat bahwa “para pelaku bisnis memiliki kewajiban untuk mengupayakan suatu kebijakan serta membuat keputusan atau melaksanakan berbagai tindakan yang sesuai berpikir dalam konsep pengembangan tanggung jawab sosial (*social responsibility*).” (Kartika, 2013:5). Hal ini berkaitan dengan pengusaha yang berkecimpung dalam dunia bisnis dan menjalankan tanggung jawab sosial, dapat membantu meningkatkan grafik implementasi kualitas CSR di Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan CSR bertujuan membina hubungan baik dengan seluruh pihak yang terkait dengan perusahaan sekaligus untuk meningkatkan citra perusahaan, melalui hubungan timbal balik dan meraih kepercayaan. Pada dasarnya perkembangan CSR terdiri dari tiga periode, yakni era tahun 1950-1960an, tahun 1970-1980an, dan tahun 1990-saat ini. Masing-masing periode ini berkembang sesuai dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Berdasarkan riset *Green Paper* yang dinyatakan oleh *The Commission for European Communities* menyatakan bahwa :

“Definisi tanggung jawab sosial korporat menunjukkan sebuah konsep tentang pengintegrasian kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup ke dalam operasi bisnis perusahaan dan interaksi sukarela antara perusahaan dan para stakeholder-nya. Hal ini setidaknya memberikan dua

hal yang terkait dengan tanggung jawab sosial korporat itu, yakni pertimbangan sosial dan lingkungan hidup serta interaksi sukarela.” (Kartini, 2009:3).

Riset diatas tersebut mengartikan bahwa sebuah masalah sosial dan lingkungan menjadi sebuah keharusan untuk perusahaan memberikan solusi dan memenuhi harapan masyarakat. Menurut *World Business Council on Sustainable Development*, mendefinisikan bahwa :

“CSR adalah komitmen dari bisnis/perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas.” (Kartika, 2013:2).

Berdasarkan definisi tersebut, bahwa peran perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat itu sangatlah penting, karena dapat membantu pembangunan ekonomi masyarakat. Program CSR berkomitmen agar perusahaan selalu mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Menurut *The World Business Council fo Sustainable Development-WBCSD*, bahwa definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah:

“Komitmen bisnis untuk kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan perusahaan serta keluarganya, berikutnya melibatkan komuniti sekitarnya dan masyarakat secara keseluruhan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan”. (Iriantara, 2013: 49).

Berdasarkan definisi diatas, bahwa kegiatan atau program yang didasarkan CSR, memiliki kepentingan untuk masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan. Sedangkan menurut Kotler & Nancy dalam bukunya *Corporate Social Responsibility*, menyatakan bahwa “CSR adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan

mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan”(Kotler & Nancy, 2005: 4). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sebagai peluang sumber daya yang dapat menghasilkan kualitas hidup masyarakat agar lebih baik.

Berdasarkan definisi-definisi diatas peneliti simpulkan bahwa *corporate social responsibility* adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu isu tertentu di masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Hasil akhir dari implementasi CSR ini tentu saja juga kembali kepada peningkatan *corporate value* yang akhirnya berpulang kembali kepada *shareholder*.

### 2.1.2.2 Konsep CSR

CSR memiliki beberapa konsep untuk menjalankan program, berikut adalah konsep CSR :

**Tabel 2.1**  
**Kategori Tanggung Jawab Sosial dan Aktivitas CSR**

<i>Discretionary responsibilities</i>	<i>Corporate giving/charity, corporate citizenship, community development</i>
<i>Ethical responsibilities</i>	Memproduksi produk makanan yang bergizi dan aman bagi konsumen
<i>Legal responsibilities</i>	Membayar pajak, mentaati Undang-Undang ketenagakerjaan
<i>Economic responsibilities</i>	Melaksanakan <i>good corporate governance</i>

(Sumber: Archie B. Carrol, *A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance*, 2013)

Konsep piramida CSR yang dikembangkan oleh Archie B. Carrol memberi *justifikasi* teoritis dan logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR

bagi masyarakat disekitarnya. Menurut pandangan Carrol, konsep CSR memuat komponen-komponen sebagai berikut:

1. *Economic Responsibilities*  
Tanggung jawab sosial utama perusahaan adalah tanggung jawab ekonomi, karena lembaga bisnis terdiri dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat secara menguntungkan.
2. *Legal Responsibilities*  
Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan menaati hukum dan peraturan yang berlaku yang pada hakekatnya dibuat oleh masyarakat melalui lembaga legislatif.
3. *Ethical Responsibilities*  
Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Etika bisnis menunjukkan refleksi moral yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara perorangan maupun secara kelembagaan (organisasi) untuk menilai suatu isu di mana penilaian ini merupakan pilihan terhadap nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat melalui pilihan nilai tersebut, individu atau organisasi akan memberikan penilaian apakah sesuatu yang dilakukan itu benar atau salah, adil atau tidak serta memiliki kegunaan (*utilitas*) atau tidak.
4. *Discretionary Responsibilities*  
Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi mereka. Ekspektasi masyarakat tersebut dipenuhi oleh perusahaan melalui berbagai program yang bersifat *filantropis*. Perusahaan juga ingin dipandang sebagai warga negara yang baik (*good citizen*) dimana kontribusi yang mereka berikan kepada masyarakat akan mempengaruhi reputasi perusahaan. Oleh sebab itu aktivitas yang dilakukan perusahaan sebagai *manifestasi discretionary responsibilities* sering juga disebut sebagai *corporate citizenship*. Sedangkan aktivitas *corporate citizenship* yang bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat (melalui pemberian pelatihan usaha, pemberian pinjaman lunak).  
(Kartika, 2013:14-16).

Berdasarkan konsep diatas, bahwa CSR memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat, selain itu CSR memberikan peluang untuk bisa menilai kinerja dan tanggung jawab perusahaan dalam mengayomi masyarakat, serta CSR dapat mengembangkan kesejahteraan masyarakat.

### **2.1.2.3. Peraturan Perundang-Undangan No. 40 Tahun 2007 mengenai Tanggung Jawab Sosial**

Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan diamanatkan dalam Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Persoalan krusial tersebut adalah :

1. Batasan atau luas lingkup perseroan yang wajib melaksanakan TJSL.
2. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi TJSL.
3. Sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL
4. Keterkaitan antara TJSL dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang khusus berlaku untuk perusahaan berupa BUMN.

Identifikasi beberapa persoalan di atas disertai dengan analisis singkat dengan memerhatikan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang permohonan uji formil dan materiil Pasal 74 UU PT terhadap UUD 1945. Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) tampaknya menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dari istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia. Peraturan menteri dan peraturan pemerintah, peseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan agar terwujud pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan



lingkungan masyarakat serta meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi bagian laba BUMN (Pasal 1 ayat 6). Pemberdayaan kondisi lingkungan masyarakat dilakukan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari laba BUMN (Pasal 1 ayat 7). Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dianggap bisa menjalankan program yang dapat mengembangkan perekonomian masyarakat.

#### **2.1.2.4 Efektivitas Program CSR**

Peneliti membahas mengenai efektivitas yang berhubungan antara *output* dan tujuan. Cara mengukur efektivitas seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut ini efektivitas secara teoritis atau praktis.

Pencapaian hasil (efektivitas) yang dilakukan oleh suatu organisasi menurut Jones terdiri dari tiga tahap, yakni :

“Pertama *input*, *conversion*, dan *output* atau keluaran, perubahan dan hasil. *Input* meliputi semua sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal. Tahapan *input*, tingkat efisiensi sumber daya yang dimiliki sangat menentukan kemampuan yang dimiliki. Tahap *conversion* ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai. Tahapan ini, tingkat keahlian sumber daya manusia dan daya tanggap organisasi terhadap perubahan lingkungan sangat menentukan tingkat produktifitasnya. Sedangkan dalam tahap *output*, pelayanan yang diberikan merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian sumber daya manusia. Organisasi yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efisien dapat meningkatkan kemampuannya untuk meningkatkan pelayanan dengan memuaskan kebutuhan pelanggan atau pengguna.” (Jones, 1994 : 19).

Berdasarkan tahapan tersebut, organisasi dapat mengembangkan kegiatan tanggung jawab sosial dengan bantuan sumber daya manusia, sehingga akan

adanya perubahan produktivitas yang baik dan menghasilkan program atau kegiatan dengan efektif. Program *CSR* bertujuan untuk memberikan solusi atas segala keluhan, keinginan, permasalahan masyarakat, khususnya masyarakat penerima bantuan pada wilayah terdekat perusahaan. Implementasi program *CSR* di dasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan efektivitas pengelolaan program *CSR*, perlu adanya sinkronisasi dan koordinasi antar kewajiban peraturan perundang-undangan pemerintah dengan perusahaan dengan *background* PT atau BUMN mulai dari perencanaan sampai implementasinya, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat maupun pihak lain yang terkait.

Faktor yang dapat mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan program *CSR* salah satunya pada pilar *empowerment* PT Pembangkit Jawa Bali UP Cirata, dengan penerapan kewajiban tanggung jawab sosial serta nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan program *CSR*. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program *CSR*, yaitu memberikan solusi setiap permasalahan, memberikan pencapaian tujuan program *CSR*, memberikan peningkatan ekonomi masyarakat, memberikan kesejahteraan hidup masyarakat penerima bantuan, memberikan dorongan masyarakat untuk terus berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan program *CSR* mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

### 2.1.3 Kesejahteraan

Secara definisi kesejahteraan merupakan “suatu kondisi atau keadaan sejahtera, baik fisik, mental maupun sosial, dan tidak hanya perbaikan terhadap penyakit sosial tertentu saja”. (Chalid, 2014:16). Definisi tersebut menggambarkan bahwa kondisi dan keadaan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Berdeseth (2015:2) yang menyatakan mengenai teori kesejahteraan yaitu “kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup antara lain kesejahteraan materi, kesejahteraan bermasyarakat, kesejahteraan emosi, dan keamanan.” (Berdeseth, 2015:2). Teori tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara haruslah didasarkan pada kepuasan dan kesenangan masyarakatnya. Hal-hal tersebut mengacu bahwa kesejahteraan tidak akan lepas dari materi atau *financial* serta rasa aman.

Friedlander mengatakan bahwa “kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi yang dilakukan melalui pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial dengan tujuan untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan serta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat”. (Friedlander, 2000:21) Hal ini

merujuk pada hubungan antar personal dalam mengembangkan dan meningkatkan kepuasan serta rasa senang yang merupakan peranan dalam kesejahteraan.

Pemahaman diatas menyatakan bahwa makna kesejahteraan bergantung pada lembaga atau pemerintahan yang harus memberikan keadilan untuk melakukan peningkatan kualitas kehidupan masyarakatnya. Menurut Bintaro, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan :

“Pertama, dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan, dan sebagainya. Melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya. Kedua, dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya. Ketiga, dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya. (Bintaro, 2009:78)

Berdasarkan poin diatas, bahwa kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Hal ini diyakini bahwa akan memberikan kesejahteraan yang dapat diukur melalui kualitas kehidupan masyarakatnya.

#### **2.1.4. Hubungan Efektivitas Program CSR dan Kesejahteraan Masyarakat**

Program CSR diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan sosial perusahaan untuk tanggung jawab pendidikan, ekonomi, moral, dan tujuan dalam tanggung jawab hukum. Sesuai dengan teori legitimasi, perusahaan selalu berusaha untuk menyesuaikan aktivitas perusahaan dengan harapan masyarakat agar perusahaan dapat diterima di masyarakat, dan perusahaan diakui telah memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat serta *stakeholdernya*. Menurut Gray, Kouhy dan Adam yang dikutip Chariri dan Ghazali (2007 : 27) mengatakan bahwa :

“Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan dari *stakeholder* sehingga aktivitas perusahaan adalah mencari dukungan tersebut. Isu-isu sosial akan terus berkembang seiring dengan dinamika yang terjadi dalam kehidupan kemasyarakatan. Isu-isu sosial tersebut berkembang sebagai wujud dari adanya perubahan dalam cara pandang hidup masyarakat yang harus segera direspon oleh perusahaan. Setelah masyarakat menerima info tentang kegiatan CSR, masyarakat memberikan umpan balik berupa kritik, saran, dan tanggapan. Umpan balik dari masyarakat memberikan indikasi bagi perusahaan apakah aktivitas perusahaan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, agar perusahaan tetap dapat diterima di masyarakat maka selanjutnya perusahaan akan terus melakukan strategi-strategi untuk mengurangi legitimasi gap.” (Chariri dan Ghazali, 2007 : 27)

Berdasarkan pemahaman diatas, implementasi program CSR merupakan realisasi dan aktualisasi dari upaya perusahaan untuk terus dekat dengan perusahaan. Program CSR yang berlangsung secara rutin dan terjadwal diharapkan dapat memberikan respon positif dan perusahaan memperoleh pengakuan bahwa perusahaan memiliki nilai sosial yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan *stakeholder*.

Pengaruh efektivitas program CSR terhadap kesejahteraan masyarakat penerima bantuan dalam penelitian ini adalah dengan mengukur indikator keberhasilan pelaksanaan program CSR khususnya pada pilar *empowerment* melalui tujuan yang direncanakan, biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan personil yang ditentukan untuk membina program agar berjalan dengan lancar dengan tujuan utama dari program yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme pelaksanaan untuk mencapai efektivitas program CSR, perlu diatur dengan baik sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Efektivitas pengelolaan program CSR

terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat agar setidaknya mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Kontribusi pembangunan dalam memberikan peluang terciptanya berbagai kesempatanpun diberikan untuk masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan. Hal ini dilakukan dengan berbagai upaya penciptaan lapangan pekerjaan baik di sektor *formal* maupun di sektor *non formal*, sehingga dapat memberikan dorongan/motivasi dalam berbagai bentuk, menciptakan iklim perekonomian yang agak longgar atau dengan kata lain lebih banyak memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk meningkatkan prestasi usahanya, dan lain-lain. Salah satu upaya tersebut ialah diimplementasikannya kebijakan/program tanggung jawab sosial yang dikenal dengan *corporate social responsibility*.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran berfungsi untuk memberikan alur pikir peneliti agar lebih terarah untuk melatarbelakangi penelitian ini. Peneliti mencoba menjelaskan mengenai pokok permasalahan dari penelitian yang dimaksud untuk menegaskan, meyakinkan dan mengabungkan teori dengan masalah yang peneliti angkat. Penelitian ini memiliki dua variabel yang akan diteliti yaitu Efektivitas dan Kesejahteraan. Dasar pemikiran untuk variabel *independent*/bebas (variabel x) peneliti mendeskripsikan mengenai definisi atau faktor-faktor yang berkaitan dengan Efektivitas. Berdasarkan konsep efektivitas yang dikemukakan Onong Uchjana Effendi, maka peneliti memilih (1). tujuan yang direncanakan (2). biaya

yang dianggarkan (3). waktu yang ditetapkan (4). personil yang ditentukan, untuk dijadikan sebagai subvariabel dari variabel efektivitas. Konsep tersebut menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam mencapai efektivitas, yaitu:

1. Tujuan yang direncanakan, merupakan tujuan untuk mencapai sebuah perencanaan yang tersusun dengan orientasi, sasaran dan target yang jelas agar tujuan yang dimaksud mempunyai kepastian.
2. Biaya yang dianggarkan, terbagi menjadi dua yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang terlihat secara fisik misalnya berupa uang, sementara itu yang dimaksud dengan biaya implisit adalah biaya yang tidak terlihat secara langsung seperti pembinaan atau pelatihan.
3. Waktu yang ditetapkan, adalah seluruh rangkaian ketika proses pengelolaan program sedang berlangsung. Berdasarkan hal tersebut, skala waktu menempatkan interval antara dua buah keadaan/kejadian, atau bisa memperkirakan lama berlangsungnya suatu kejadian.
4. Personil yang ditentukan, adalah keseluruhan anggota/pembina yang ikut berperan serta dalam mengatur jalannya rencana kegiatan/program melalui komunikasi yang dapat dipahami.

Peneliti memilih teori kesejahteraan dari Berdeseth untuk dijadikan fokus penelitian pada variabel terikat atau variabel Y. Teori tersebut menyatakan kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup antara lain :

kesejahteraan materi, kesejahteraan bermasyarakat/sosial, kesejahteraan emosi, dan keamanan. Oleh sebab itu, peneliti memilih empat poin untuk dijadikan sebagai subvariabel dari variabel kesejahteraan dalam penelitian, antara lain :

- a. Kesejahteraan materi atau kesejahteraan finansial yang dipersepsikan mengacu pada penilaian subyektif individu atas kondisi keuangan pribadi atau berfokus pada persepsi dan perasaan tentang situasi keuangan mereka pada pendapatan.
- b. Kesejahteraan bermasyarakat/sosial yang berarti untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, pembinaan dan kesehatan.
- c. Kesejahteraan emosi, yang mengacu pada pemberian respon yang berbeda-beda terhadap pemicu emosi baik positif maupun negatif.
- d. Keamanan, mengacu pada keadaan aman dan tenang dalam menjalankan kegiatan atau program.

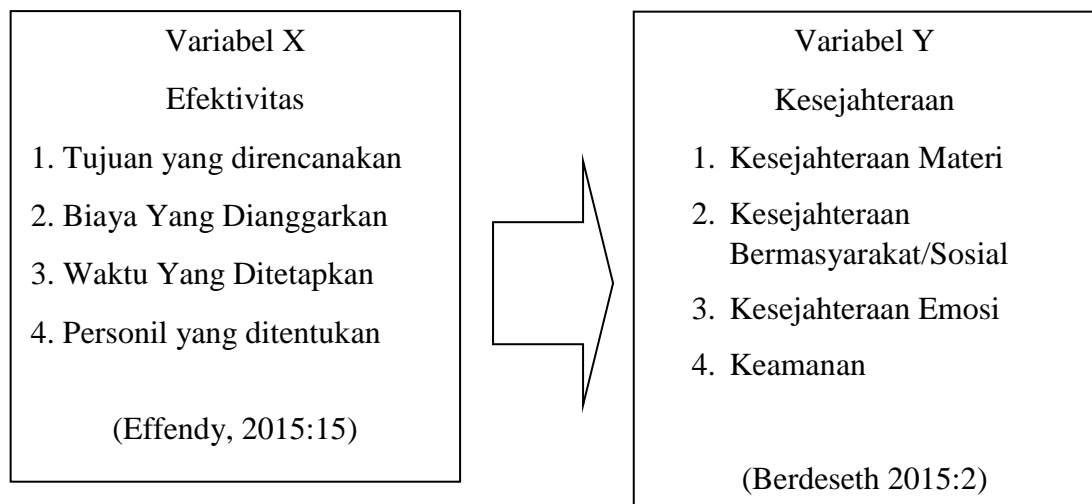
Teori kesejahteraan dari Berdeseth ini senada dengan kajian permasalahan peneliti terkait dengan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan melalui program CSR pilar *empowerment* yang dijalankan oleh PT Pembangkit Jawa-Bali Unit Pembangkitan Cirata. Sehingga teori kesejahteraan tersebut peneliti gunakan untuk membantu serta memudahkan peneliti dalam penyusunan angket pada proses pengumpulan data penelitian. Selanjutnya untuk mempermudah peneliti dalam memahami pokok-pokok pikiran dari setiap teori yang digunakan, maka dibuatlah kerangka pemikiran yang didasarkan atas pola pikir peneliti dalam menyikapi pengaruh efektivitas program *corporate social responsibility* pilar



*empowerment* PT Pembangkit Jawa-Bali Unit Pembangkitan Cirata terhadap kesejahteraan masyarakat penerima bantuan Kecamatan Tegalwaru.

Model kerangka penelitian ini dibentuk dengan gambar atau arahan untuk memberikan kemudahan pembaca agar mengerti dengan isi penelitian. Model kerangka pemikiran juga diharapkan dapat menjadi sebuah acuan pelaksanaan penelitian yang nantinya bisa dipergunakan peneliti untuk membantu proses penelitian.

**Gambar 2.1**  
**Model Kerangka Pemikiran**



Berdasarkan gambar model kerangka pemikiran di atas, tanda panah yang mengarah pada kotak bagian kanan menunjukkan bahwa efektivitas program CSR berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat penerima bantuan. Pada tabel variabel (X) atau variabel efektivitas, terdiri dari subvariabel yaitu (1) tujuan yang direncanakan (2) biaya yang dianggarkan (3) waktu yang ditetapkan (4) personil yang ditentukan. Variabel (X) merupakan variabel bebas dan mempengaruhi variabel terikat yaitu variabel (Y) yang terdiri dari subvariabel (1) kesejahteraan

materi (2) kesejahteraan bermasyarakat/sosial (3) kesejahteraan emosi (4) keamanan.

### **1.3 Hipotesis**

Peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara efektivitas program *corporate social responsibility* pilar *empowerment* PT Pembangkit Jawa-Bali Unit Pembangkitan Cirata terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tegalwaru.

H1 : Terdapat pengaruh antara efektivitas program *corporate social responsibility* pilar *empowerment* PT Pembangkit Jawa-Bali Unit Pembangkitan Cirata terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tegalwaru.